

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
KABUPATEN TRENGGALEK
(Studi di Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek)**

S K R I P S I

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Administrasi Publik
Pada Universitas Tulungagung**



Disusun oleh :

**TUTUT KURNIAWATI
NPM 2061404100017**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
2025**

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
KABUPATEN TRENGGALEK
(Studi di Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Administrasi Publik
Pada Universitas Tulungagung



Oleh :

**TUTUT KURNIAWATI
NPM 2061404100017**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. ANANG SUGENG C.S.AP,S.H.,M.Si
NIDN. 0708088201

Drs. SLAMET HARIYANTO, MM
NIDN. 0720066102

Mengetahui

Dekan,

Dra. NUNUN NURHAJATI. M.Si
NIDN. 0707116701

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
KABUPATEN TRENGGALEK
(Studi di Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Administrasi Publik
Pada Universitas Tulungagung



Oleh :

**TUTUT KURNIAWATI
NPM 2061404100017**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. ANANG SUGENG C, S. AP, S. H., M. Si
NIDN. 0708088201

Drs. SLAMET HARIYANTO, MM
NIDN. 0720066102

**ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
KABUPATEN TRENGGALEK
(Studi di Dinas Peternakan
Kabupaten Trenggalek)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**TUTUT KURNIAWATI
NPM 2061404100017**

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Pada Tanggal

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama,

Anggota Tim Penguji Lain,

Dr. ANANG SUGENG C.S.AP,S.H.,M.Si
NIDN. 0708088201

Dra. ANGKASAWATI, M.Si
NIDN. 0731086301

Pembimbing Pendamping,

Drs. SLAMET HARIYANTO, MM
NIDN. 0720066102

Mengetahui

Dekan,

Dra. NUNUN NURHAJATI, M.Si
NIDN. 0707116701

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas segala karunianya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si. selaku Rektor Universitas Tulungagung.
2. Ibu Dra. Nunun Nurhajati, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Laily Purnawati, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik sekaligus pembimbing pendamping.
4. Bapak Dr. Anang Sugeng C, S.AP, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung yang telah berkenan membantu penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Tulungagung.
6. Pihak Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek yang telah memberikan ijin, waktu, dan tempat untuk penelitian, dan bimbingan selama penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam seluruh proses perkuliahan di Universitas Tulungagung terimakasih atas doa dan motivasinya.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak untuk perbaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Tulungagung, Mei 2024
Penulis

TUTUT KURNIAWATI

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Cover Dalam	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel	ix
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	x
Abstrak.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kebijakan Publik.....	6
1. Pengertian Kebijakan Publik	6
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	9
3. Ruang Lingkup Kebijakan Publik.....	12
B. Retribusi Daerah	17
1. Pengertian Retribusi	17
2. Jenis - Jenis Retribusi Daerah	18
3. Retribusi Rumah Potong Hewan.....	25
C. Penelitian Terdahulu	26
D. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Fokus Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	35
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisa Data	37
H. Keabsahan Data	39

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1.	Profil Wilayah Kabupaten Trenggalek.....	42
2.	Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek.....	47
a.	Visi dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek...	47
b.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi	49
c.	Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek	52
d.	Daftar Jumlah Pegawai.....	55
e.	Sarana dan prasarana	55
B.	Hasil penelitian.....	56
1.	Analisis Kebijakan Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Trenggalek.....	57
a.	Kerangka Kerja (<i>policy framework</i>).....	57
b.	Strategi-Strategi Policy (<i>policy strategy</i>)	58
c.	Kejelasan Tentang Kepentingan Masyarakat (<i>public interst</i>)	58
d.	Isi kebijakan dan evaluasinya.....	59
e.	Partisipasi Masyarakat (<i>public participation</i>)	60
2.	Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Trenggalek.....	61
C.	Pembahasan	62
1.	Analisis Kebijakan Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Trenggalek	62
a.	Kerangka Kerja (<i>policy framework</i>).....	62
b.	Strategi-Strategi Policy (<i>policy strategy</i>)	63
c.	Kejelasan Tentang Kepentingan Masyarakat (<i>public interst</i>)	64
d.	Isi kebijakan dan evaluasinya.....	64
e.	Partisipasi Masyarakat (<i>public participation</i>)	65
2.	Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pembayaran Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Trenggalek.....	65
BAB V	PENUTUP	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Pemikiran	31
Gambar 2	Komponen Analisa Data Model Interaktif.....	39
Gambar 3	Peta Wilayah Kabupaten Trenggalek	46
Gambar 4	Kantor Dinas Peternakan kabupaten Trenggalek (Tampak dari depan).....	48
Gambar 5	Kantor Dinas Peternakan kabupaten Trenggalek (Tampak dari samping).....	49
Gambar 6	Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek...	53
Gambar 7	Tampak Depan Ruang UPT Pusat Pembibitan Ternak dan RPH Ngadirenggo Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek	54
Gambar 8	Tampak Tengah Ruang UPT Pusat Pembibitan Ternak dan RPH Ngadirenggo Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Trenggalek tahun 2023 dan 2024	47
Tabel 2	Sarana Prasarana Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek	55

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain, untuk mendapatkan karya ilmiah atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sebuah naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Tulungagung,

TUTUT KURNIAWATI
NPM 2061404100017

ABSTRAK

Judul: Analisis Kebijakan Publik Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Trenggalek (Studi di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek), Oleh: Tutut Kurniawati, NPM 2061404100017, Program Studi: Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tulungagung.

Sumber pendapatan negara untuk pembangunan saat ini diperoleh dari adanya pajak dari masyarakat. Melalui regulasi tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa rumah pemotongan hewan (RPH) diwajibkan untuk membayar retribusi. Maksud dari penarikan retribusi adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di Kabupaten Trenggalek keberadaan RPH dibawah naungan Dinas Peternakan. Secara normatif terdapat kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembayaran retribusi serta mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebijakan pembayaran retribusi pada UPT. Rumah Potong Hewan Kabupaten Trenggalek dilakukan melalui pendekatan Caiden dalam Thoha (1984) memperoleh hasil bahwa kebijakan ini dijalankan oleh Kepala Dinas Peternakan yang berperan sebagai pengambil kebijakan serta Kepala UPT. Rumah Potong Hewan Trenggalek sebagai pejabat teknis yang melaksanakan pengelolaan pembayaran retribusi di RPH tersebut. Koordinasi secara eksternal juga dilakukan dengan Badan Pendapatan Daerah Trenggalek dan Bank Daerah dalam hal penyetoran dan pelaporan retribusi yang masuk di UPT. RPH Trenggalek. Strategi kebijakan guna mendukung kebijakan pemerintah seperti kebijakan pembayaran retribusi pada UPT. Rumah Potong Hewan dilakukan dengan melakukan koordinasi yang dilakukan secara rutin mulai dari sosialisasi, monitoring, evaluasi bersama, jajak pendapat kunjung ke rumah jagal. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat diwujudkan melalui alasan diberlakukannya kebijakan sistem pembayaran retribusi di UPT. Rumah Potong Hewan Trenggalek dimana masyarakat merasa terbantu karena dengan nilai retribusi yang kecil namun bisa mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang maksimal dan optimal. Sistem pengelolaan masih dilakukan secara manual dimana setiap sore hari ada petugas retribusi yang menjaga dan mengatur sapi yang datang dari jagal yang kemudian pihak jagal akan diberikan bukti tiket retribusi setelah melakukan pembayaran. Petugas akan melaporkan Untuk proses monitoring dan evaluasi Kebijakan Pembayaran Retribusi pada UPT. Rumah Potong Hewan sudah dilakukan setiap bulan oleh pihak-pihak terkait kebijakan pembayaran retribusi di Rumah Potong Hewan Kabupaten Trenggalek ditemukan bahwa kebijakan ini belum pernah disosialisasikan sehingga peran masyarakat dalam kebijakan ini mulai dari awal penyusunan kebijakan dan implementasi dinilai masih sangat minim.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Retribusi, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Title: Public Policy Analysis on Slaughterhouse Levy in Trenggalek Regency (Study at the Trenggalek Regency Animal Husbandry Service), By: Tutut Kurniawati, NPM 2061404100017, Study Program: Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tulungagung University.

The source of state revenue for development is currently obtained from taxes from the community. Through the 2009 regulation concerning regional taxes and regional levies, it is stated that slaughterhouses (RPH) are required to pay levies. The purpose of collecting levies is to increase regional original income (PAD). In Trenggalek Regency, the existence of RPH is under the auspices of the Animal Husbandry Service. Normatively, there is a Regional Regulation (PERDA) of Trenggalek Regency Number 16 of 2013 concerning Slaughterhouse Levy. The study aims to analyze the levy payment policy and determine the factors that influence the implementation of the slaughterhouse levy payment policy in Trenggalek Regency. The results of the study indicate that the analysis of the levy payment policy at the UPT. Trenggalek Regency Slaughterhouse is carried out through the Caiden approach in Thoha (1984) obtained the results that this policy is implemented by the Head of the Animal Husbandry Service who acts as a policy maker and the Head of UPT. Trenggalek Slaughterhouse as a technical official who manages the payment of levies at the RPH. External coordination is also carried out with the Trenggalek Regional Revenue Agency and Regional Banks in terms of depositing and reporting levies received at UPT. Trenggalek RPH. Policy strategies to support government policies such as the policy of paying levies at UPT. Slaughterhouse are carried out by carrying out coordination which is carried out routinely starting from socialization, monitoring, joint evaluation, opinion polls visiting the slaughterhouse. The clarity of community interests is manifested through the reasons for implementing the retribution payment system policy at UPT. Trenggalek Slaughterhouse where the community feels helped because with a small retribution value they can get maximum and optimal services and facilities. The management system is still carried out manually where every afternoon there are retribution officers who guard and regulate the cattle coming from the slaughterhouse which then the slaughterhouse will be given proof of retribution tickets after making payment. Officers will report For the monitoring and evaluation process of the Retribution Payment Policy at the UPT. Slaughterhouse has been carried out every month by parties related to the retribution payment policy at the Trenggalek Regency Slaughterhouse, it was found that this policy had never been socialized so that the role of the community in this policy from the beginning of the policy formulation and implementation was considered still very minimal.

Keywords: Policy Analysis, Retribution, Local Government